

DAMPAK DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI ACEH

Nasril Isnadi^{1*} . Fikriah²

- 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
email : nasrilisnadi@gmail.com
- 2) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
email : haridhi_fikriah@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine how much the impact and analysis of the special autonomy fund received by Aceh Province on the growth of the Human Development Index. This research focuses on the development and projection of HDI in line with the existence of special autonomy funds received from the central government to the Aceh government from 2008. The types of data used in this study are secondary data in the form of times series from 1996 - 2018. Data analysis methods used this research is trend liner square. The results showed that the Aceh Province HDI Value from 1996 to 2016 where the data was divided into 2 linear trends, namely before the DOK from 1996 - 2008 with the equation model $Y = 0.5823x - 2.0954$. While the linear trend after the DOK is from 2008 - 2016, namely $Y = - 0.1888x + 2.2329$. Based on the results of multiple linear regression analysis where the results of the analysis show that the DOK is not significant towards the growth of the human development index (HDI).

Keywords:HDI, DOK

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak dan menganalisis dari Dana Otonomi khusus yang di terima Provinsi aceh terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menitik beratkan perkembangan dan proyeksi IPM sejalan dengan keberadaan dana otonomi khusus yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dari tahun 2008. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk times series dari tahun 1996 - 2018. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah trend liner square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai IPM provinsi Aceh 1996 – 2016 dimana data ini terbagi dalam 2 trend linier yaitu sebelum DOK dari tahun 1996 – 2008 dengan model persamaan $Y = 0,5823x - 2,0954$. Sedangkan trend linier setelah DOK yaitu dari tahun 2008 – 2016 yaitu $Y = - 0,1888x + 2,2329$. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dimana hasil analisis menunjukkan bahwa DOK tidak signifikan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM).

Kata Kunci : IPM, DOK

PENDAHULUAN

Penetapan Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus merupakan salah satu kebijakan strategis yang diharapkan dapat membantu dalam peningkatan pelayanan publik, mendorong adanya akselerasi pembangunan, dan instrumen pemberdayaan seluruh masyarakat Aceh. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah) yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Provinsi Aceh merupakan daerah ketiga yang menerima perlakuan khusus yaitu dengan menerima status sebagai daerah Otonomi khusus dengan memberikan kebebasan dalam menjalani sistem pengadilan dan pendidikan sendiri. Pada tahun 2008 Provinsi Aceh mulai menerima dana otonomi khusus sampai tahun 2027. Pemberian dana otonomi khusus ini di alokasikan kepada peningkatan pembangunan manusia yang ada di provinsi Aceh. Pertumbuhan IPM di Provinsi Aceh mengalami fluktuatif, pada 2008 – 2013 kondisi IPM lebih stabil dan mengalami fluktuatif pada tahun 2014 turun menjadi -5,18% dan naik kembali sebesar 0,93%. Penurunan tingkat IPM ini bukan karena kualitas IPM aceh yang menurun, tapi Lembaga Badan Pusat Statistik menggunakan metode baru dalam menghitung tingkat pertumbuhan IPM yang dari 3 indikator menjadi 4 indikator. 4 indikator tersebut yaitu angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Otonomi Khusus

Timbulnya kebijakan pemberian dana otonomi khusus di Provinsi Aceh dikarenakan faktor politik yaitu konflik antara masyarakat dengan pemerintah pusat yang telah terjadi sekian lama dan berkeinginan memisahkan diri dari NKRI.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengetahui keberhasilan sebuah kinerja negara dapat dilihat dari tingkat indeks pembangunan manusianya (IPM), dimana dengan mengetahui indeks tersebut yang mencakup tiga komponen dasar pembangua manusia yaiu bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang ekonomi.

Penelitian Sebelumnya

Menurut Sumardjoko, (2014), besarnya dana otonomi khusus di Provinsi Papua yang terbagi kepada Papua dan Papua Barat dari tahun 2002 – 2012 mencapai Rp.33,854 T. Kondisi ini sesuai dengan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Papua dan UU No.35 tahun 2008 di Papua Barat. Dengan adanya Otonomi khusus, maka provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh besaran dana mencapai 2 persen dari total alokasi DAU nasional.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis dampak dari dana otonomi khusus terhadap IPM Aceh yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari DOK dalam pemanfaatan dana otonomi khusus tersebut sehingga berdampak pada IPM yang terus meningkat.

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu dengan mengambil data dari lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal atau badan yang terkait dengan penelitian ini. Data bersumber dari BPS dan Biro Adm. Pembangunan Setda Provinsi Aceh.

Model Dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui nilai dari dampak dana otonomi khusus terhadap IPM yaitu dengan menggunakan:

1. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui nilai dari dampak dana otonomi khusus terhadap IPM yaitu dengan menggunakan: Model yang digunakan yaitu *trend linier least square* (Lind, Douglas A., 1967) dengan persamaan $Y = a + bt$
2. Mengetahui pengaruh dana otonomi khusus terhadap IPM menggunakan Regresi Linier sederhana yaitu

$$\hat{y} = a + bx$$

Yang di sesuaikan kembali menjadi kedalam semi log

$$\text{Log IPM} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log DOK} + e_i$$

Definisi Oprasional Variabel

Untuk menguji hipotesis yang telah diduga maka perlu adanya batasan variabel yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Dana otonomi khusus yang dihitung dalam satuan rupiah(Rp).
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran perbandingan dari tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi di suatu negara yang dihitung dalam satuan persen(%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Provinsi Aceh

Angka Harapan Hidup

AHH yaitu rata-rata mencapai 68,47 tahun artinya rata-rata penduduk di Provinsi Aceh mampu hidup sampai umur 68,47 tahun. Dimana angka harapan hidup ini dari tahun ketahun mengalami kenaikan yaitu pada tahun 1996 AHH hanya 66,40 tahun kondisi ini disebabkan oleh adanya peningkatan pelayanan kesehatan yang sudah lebih baik dan gratis bagi setiap penduduk aceh yang memiliki KTP aceh, sedangkan pada tahun 2016 angka harapan hidup telah mencapai 69,51 tahun.

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf di Provinsi Aceh rata-rata mencapai 96,35 persen, artinya masyarakat yang telah menerima pendidikan di Provinsi Aceh telah mencapai 96,35 persen dan total penduduk yang ada di Provinsi Aceh. Jika dilihat dari angka melek huruf, maka adanya peningkatan angka melek huruf. Sedangkan pada tahun 1996 hanya 90,10 persen dan terus mengalami peningkatan mencapai ± 9 persen pada tahun 2016. Meningkatnya angka melek huruf (AMH) lebih disebabkan adanya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai program dalam pengentasan kemiskinan sehingga mempengaruhi keinginan masyarakat untuk belajar dan mengenal pendidikan lebih baik.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh yaitu 8,35 tahun atau dapat dikatakan rata-rata belum tamat SMP. Jika dilihat dari tahun 1996 maka rata-rata lama sekolah hanya 7 tahun serta pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah yang tertinggi yang di capai di Provinsi Aceh yaitu mencapai 8,43 tahun yang berarti hampir seluruh penduduk memperoleh pendidikan dengan tingkat pendidikan minimal tamatan SMP.

Pengeluaran Perkapita

Perkembangan kemampuan penduduk dalam pengeluaran perkapita dari tahun 1996 – 2013 yaitu dengan rata-rata tingkat pertumbuhan mencapai 2,93 persen atau rata-rata besarnya pengeluaran perkapita mencapai Rp.64.404.000 per tahun.

Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Mulai tahun 2008, Aceh mendapatkan DOK dari pemerintah pusat agar Aceh bisa mengejar ketertinggalan pembangunannya setelah mengalami konflik. Berikut ini adalah tabel jumlah anggaran DOK yang sudah diterima oleh pemerintah Aceh dari tahun 2008 – 2015:

Tabel 1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2008 - 2016

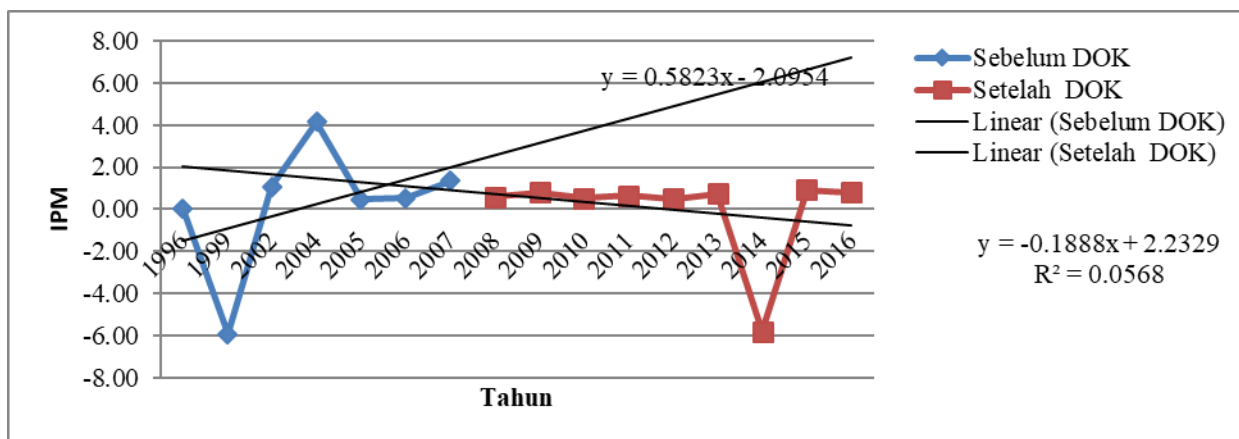
Tahun	Dana Otsus (satuan rupiah)	Pertambahan Anggaran (Persen)
2008	3.590.142.897.000	-
2009	3.728.282.000.000	3,85
2010	3.849.806.840.000	3,26
2011	4.510.656.496.500	17,17
2012	5.476.288.764.000	21,41
2013	6.222.785.783.000	13,63
2014	6.824.386.514.000	9,67
2015	7.057.756.971.000	3,42
2016	7.701.521.000.000	9,12

Sumber : Biro Adm. Pembangunan Setda Provinsi Aceh, 2018

Tabel 1. di atas menunjukkan besaran dana otsus di Provinsi Aceh, dimana setiap tahunnya dana otsus tersebut bertambah besaran anggarannya. Periode 2011-2012 adalah yang paling besar pertambahan besaran anggarannya yaitu sebesar 965.632.267.500 rupiah atau 21,40 persen dan yang paling kecil pertambahan besaran anggarannya yaitu pada periode 2009–2010 dimana hanya bertambah 121.524.840.000 rupiah atau 3,25 persen. Pertambahan besaran anggaran dana otsus setiap tahun tersebut berasal dari dana alokasi umum nasional yang juga bertambah besaran anggaran setiap tahunnya, dimana 2 persen dari dana alokasi umum nasional dianggarkan untuk tahun pertama sampai tahun kelima belas dana otsus Provinsi Aceh, yang berarti juga pendapatan dalam negeri bertambah besar setiap tahunnya karena jumlah anggaran dana alokasi umum nasional berdasarkan PP No.55 tentang Dana Perimbangan, berasal dari sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDN Neto).

**Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus Terhadap IPM di Provinsi Aceh
 Perhitungan IPM Provinsi Aceh dari Tahun 1996 – 2016**

Untuk mengetahui laju trend IPM di Provinsi Aceh dari tahun 1996 sampai tahun 2007 sebelum DOK, dan dari tahun 2008 – 2016 dengan menggunakan setelah DOK maka dapat dilihat dari garis trend linier least square dibawah ini:



Sumber : BPS Provinsi Aceh, 2017

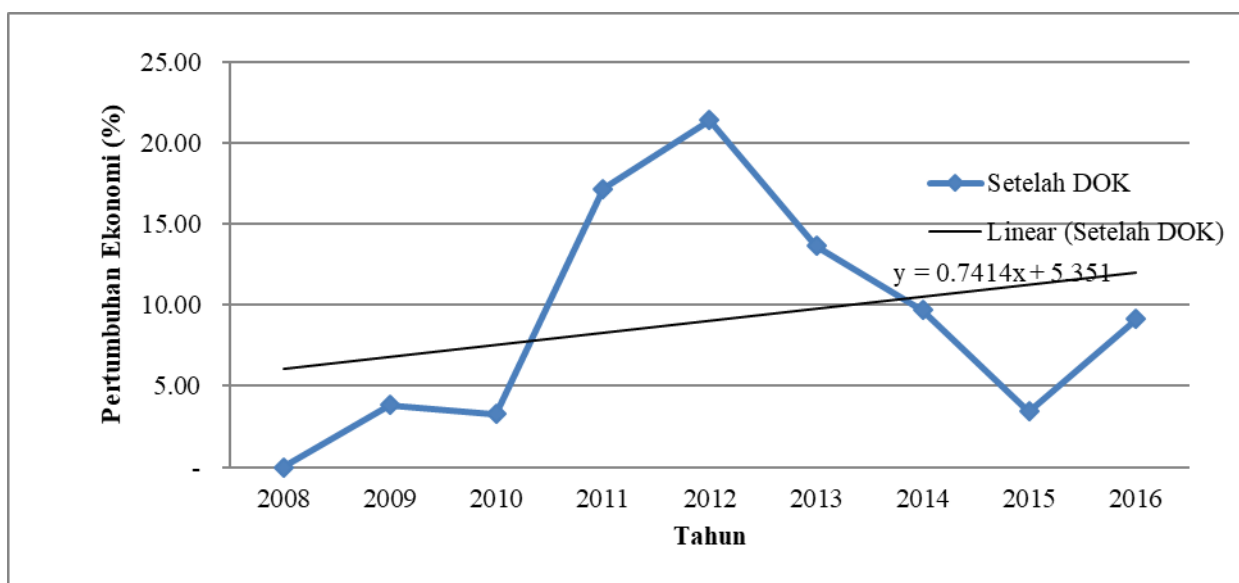
Gambar 1. Grafik Trend Linier Least Square IPM Tahun 1996 - 2016

Berdasarkan gambar 1. di atas dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh dari tahun ketahun mengalami kenaikan dimana kenaikan tersebut bersifat konstan dan lurus. Adapun model persamaan yang dihasilkan dari trend linier least square dari tahun 1996 - 2007 yaitu $Y = 0,5823x - 2,0954$, dimana artinya adalah $Y = IPM$ dan X adalah tahun. Apabila tanpa ada perubahan waktu maka nilai IPM di Provinsi Aceh yaitu 2,0954 dengan perubahan waktu sehingga indeks meningkat sebesar 0,5823 persen per tahun. Sedangkan trend linier least square dari tahun 2008 – 2016 yaitu $Y = -0,1888x + 2,2329$ dimana artinya adalah $Y = IPM$ dan X adalah tahun. Apabila tanpa ada perubahan waktu maka nilai IPM di Provinsi Aceh yaitu 2,2329 dengan perubahan waktu sehingga indeks meningkat sebesar 0,1888 persen pertahun.

Hasil analisis trend linier yang diproyeksikan dari IPM secara keseluruhan bahwa IPM Provinsi Aceh mengalami kenaikan seiring waktu. Hal ini disebabkan DOK yang diberikan pemerintah pusat lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik semata, sehingga alokasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan serta ekonomi tidak terlalu berpengaruh, serta pada akhirnya IPM yang terbentuk tidak banyak terbantu oleh DOK tersebut.

Perhitungan IPM dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus

Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan trend linier terhadap IPM yang dimana telah menerima DOK di provinsi Aceh yaitu mulai tahun 2008 – 2013 terlihat pada garfik sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Trend Linier Least Square IPM Tahun 2008 – 2016

Berdasarkan gambar 2. di atas dapat dilihat bahwa IPM di Provinsi Aceh pada saat menggunakan DOK dari tahun 2008 – 2013, dimana terjadi kenaikan IPM bersifat konstan dan lurus. Adapun model persamaan yang dihasilkan dari *trend linier least square* tahun 2008 – 2013 yaitu $y = 0,7414x + 5,351$, dimana artinya adalah Y = IPM dan X adalah tahun. Apabila tanpa ada perubahan waktu maka nilai IPM di Provinsi Aceh yaitu 5,351 dengan perubahan waktu sehingga indeks meningkat sebesar 3,8498 persen pertahun.

Kenaikan IPM di provinsi Aceh dikarenakan dengan adanya DOK yang diberikan oleh pemerintah pusat, dapat dipergunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang perbaikan IPM di Provinsi Aceh, sehingga dengan semakin besarnya DOK yang diperoleh maka semakin besar peluang peningkatan IPM di Provinsi Aceh.

Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap IPM di Provinsi Aceh

Untuk mengetahui besarnya pengaruh DOK terhadap IPM di Provinsi Aceh, maka dapat menggunakan analisis linier regresi sederhana. Adapun hasil analisis linier regresi linier sederhana adalah:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Least Square IPM Tahun 2014-2016

Variable	Nama variabel	Koefisien	T	Sig
A	Constanta	0,071	-0,055	0,958
x	DOK	-0,003	-0,027	0,979
R	:	0,010		
R ²	:	0,000		
F _{hitung}	:	0,001		
F _{tabel}	:	2,820		
T _{tabel}	:	1,680		

Sumber: Data primer (diolah 2018)

Berdasarkan koefisien regresi dari masing-masing variable bebas pada persamaan regresi di atas, maka apabila nilai DOK dianggap 0 atau konstan, maka akan meningkatkan IPM Provinsi Aceh rata-rata sebesar 0,071 persen. Untuk variabel dana otsus (DOK) menunjukkan

nilai koefisien sebesar 0,003, berarti setiap peningkatan DOK sebesar 1 persen yang dibagikan kepada Provinsi Aceh, maka akan menurunkan IPM sebesar 0,003 persen. Hal ini disebabkan DOK yang diberikan telah digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik sehingga tidak mempengaruhi peningkatan kesejahteraan rakyat yang ada di Provinsi Aceh, dan penggunaannya lebih kepada peningkatan IPM.

Untuk melihat secara statistik hasil uji serempak (uji-F) juga signifikan yaitu $F_{hit} < F_{tabel}$, artinya DOK tidak dapat mempengaruhi IPM secara positif.

1) Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

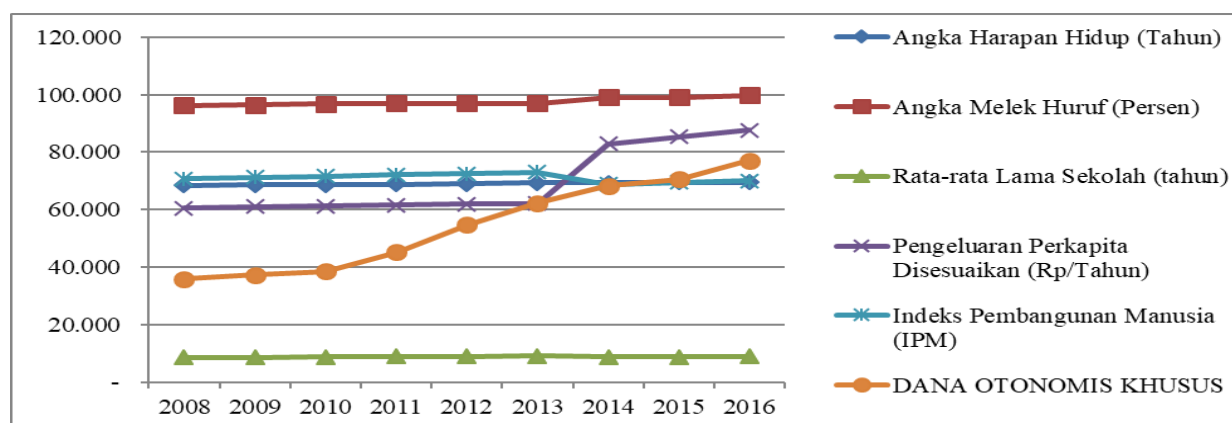
Adapun besarnya nilai koefisien determinasi R² yaitu 0,102 yang berarti 10,20 persen variasi perubahan IPM dipengaruhi oleh DOK, sedangkan sisanya 89,80 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar faktor-faktor didalam penelitian ini. Sedangkan koefisien Korelasi (R) menunjukkan bahwa kedua variabel sangat lemah dan positif yaitu $R = 0,111$.

2) Uji parsial (t)

Kedua koefisien menunjukkan signifikan dengan prob.Value 0,000 masih dibawah 5% (uji parsial) dan untuk variabel DOK koefisien menunjukkan bahwa prob.value 0,979 yaitu diatas 5%. Untuk melihat secara statistik tingkat signifikan koefisien regresi (pengaruh dari masing-masing variable independent), maka diuji secara terpisah (parsial) antara variable independent terhadap variable dependent dengan uji-t. hasil pengujian secara parsial atau uji-t bagi setiap variable dengan tingkat kepercayaan 95% (taraf nyata = 5%). Hasil analisis terhadap variable DOK diperoleh $t_{hitung} = -0,027$, sedangkan $t_{tabel} = 1,680$, hal ini menunjukkan $t_{hit} < t_{tabel}$. Dari hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa variabel DOK tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan IPM di Provinsi Aceh. Tidak berpengaruhnya variabel DOK terhadap peningkatan IPM di Provinsi Aceh pada Tahun 2008 – 2016 lebih disebabkan telah terjadi pemerataan ekonomi sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi 4 indikator IPM telah sesuai harapan, dimana pembangunan yang telah dilakukan kurun waktu 2008 – 2013 telah memberikan hasil dimana adanya kemandirian masyarakat dalam mencapai angka harapan hidup (AHH), angka melek huruf (AMH), lama bersekolah (LB) serta pengeluaran perkapita masyarakat telah tinggi, sehingga timbul kesadaran untuk menjaga apa yang telah mereka capai.

Analisa Pengaruh DOK terhadap IPM

Adapun analisa yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh DOK terhadap IPM yang terdiri dari indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Perkapita (PP) seperti terlihat pada Gambar 4.13 berikut :



Gambar 3. Grafik Perubahan DOK, IPM, AHH, AMH, RLS dan PP dari Tahun 2008 – 2016

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa kenaikan DOK mempengaruhi IPM dimana DOK dari tahun 2008 – 2013 naik begitu juga dengan IPM, sedangkan untuk indikator AHH, AMH, PP dan RLS lebih konstant atau tidak mengalami perubahan yang signifikan seperti IPM yang menunjukkan perubahan, sedangkan pada tahun 2014 – 2016 IPM mengalami perubahan yang signifikan yaitu turun, sedangkan AMH mengalami kenaikan termasuk pada PP yang kenaikannya sangat besar dibandingkan indikator lainnya.

Dengan demikian tergambar bahwa perubahan IPM yang terjadi di Provinsi Aceh semata-mata lebih disebabkan perubahan metode perhitungan, dan bila dilihat dari kontribusi DOK menunjukkan bahwa indikator IPM tidak mengalami kenaikan yang berarti, oleh karena itu DOK yang diperoleh Provinsi Aceh lebih banyak dialokasikan kepada pembangunan fisik, tidak menyentuh pada pembangunan manusianya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Nilai IPM provinsi Aceh 1996 – 2016 dimana data ini terbagi dalam 2 trend linier yaitu sebelum DOK dari tahun 1996 – 2008 dengan model persamaan $Y = 0,5823x - 2,0954$. Dimana hasil analisis trend linier menunjukkan bahwa adanya trend positif IPM sebelum ada DOK. Sedangkan trend linier setelah DOK yaitu dari tahun 2008 – 2016 yaitu $Y = -0,1888x + 2,2329$, menunjukkan bahwa pergerakan IPM di Provinsi Aceh dari tahun 2008 – 2016 terjadi trend negatif yang menandakan bahwa IPM mengalami penurunan. Terjadinya perbedaan IPM sebelum dan setelah ada dana DOK dipengaruhi oleh perubahan metodologi perhitungan IPM, sehingga pada tahun 2014 – 2016 trend IPM turun dimana pada tahun 2014 metode perhitungan IPM berubah dari 3 indikator yang digunakan sebelumnya berubah menjadi 4 indikator sehingga nilai IPM lebih kecil. Kondisi ini terlihat pada IPM tahun 2014 – 2016 yaitu lebih kecil dibandingkan IPM tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dimana hasil analisis menunjukkan bahwa DOK tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM), hal ini disebabkan DOK yang selama ini alokasikan lebih kepada pembangunan fisik semata, sedangkan pembangunan non fisik yang mempunyai dampak langsung terhadap IPM sangat kecil, sehingga besar kecilnya DOK yang diterima oleh Provinsi Aceh tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan IPM.

Saran

- a. Adanya pemerataan pelaksanaan program pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan harapan hidup, keinginan melek huruf, dan menempuh pendidikan serta semakin meningkatnya daya beli masyarakat khususnya pada masyarakat miskin.
- b. Untuk meningkatkan peran DOK dalam peningkatan IPM di Provinsi Aceh perlunya kebijakan yang menyentuh langsung kepada permasalahan inti IPM itu sendiri yaitu permasalahan angka kemiskinan, angka harapan hidup, angka melek huruf, lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Sehingga Provinsi Aceh dapat menyaingi Provinsi lainnya di Indonesia dalam hal kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrika Sembiring. 2015. Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi Aceh. Program Studi Ekonomi Pembangunan Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan. Skripsi Tidak Dipublikasikan.
- Aziz, I. J. (1994). Ilmu Ekonomi Regional Dan Beberapa Aplikasinya Di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Ststistik . (2018).
- Biro Adm. Pembangunan Setda Provinsi Aceh. (2017).
- Brata, A. G. (2002). Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Cut Sri Hartati, 2016.* Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Aceh. Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 5, No. 2, Mei 2016.
- Fauzi, G. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Papua Terendah. Republika.
- Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama. Salemba empat, Jakarta.
- Haris, S. (2007). Desentralisasi dan otonomi daerah. LIPPI pres. Hal 4.
- Haris, S. (2007). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Akuntabilitas pemerintah Daerah. LIPI Press.
- Hijrah (2014) Dana Otsus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
- Kuncoro, M. (1997). Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Lind, Douglas A. (1967). Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi.
- McGuire. (2002). Fiscal Decentralization in Spain: An Asymmetric Transition to Democracy. University of Illinois, Chicago.